

DESENTRALISASI

FORMULASI KEBIJAKAN DAN PARTISIPASI



TEORI, KONSEP DAN IMPLEMENTASI

A stylized map of Indonesia in red, set against a background of a blue sky with white clouds and a green landscape. The map is positioned horizontally across the middle of the cover.

**Andi Yusran
Zulmasyhur
Bhakti Nur Avianto**

DESENTRALISASI

FORMULASI KEBIJAKAN DAN PARTISIPASI



TEORI, KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Penulis:

Andi Yusran

Zulmasyhur

Bhakti Nur Avianto

Penerbit:



DESENTRALISASI

FORMULASI KEBIJAKAN DAN PARTISIPASI
TEORI, KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Penulis:

Andi Yusran

Zulmasyhur

Bhakti Nur Avianto

ISBN : 978-602-52023-2-2

Editor : Wahyu Triono KS

Desain & Layout : Wahyu Triono KS

Pemeriksa Aksara : Achmad Firdaus

Pemeriksa Bahasa : Yusmiti Tarmizi

Penerbit : LEADER (Lembaga Edukasi dan Advokasi
Demokrasi dan Ekonomi Rakyat).

Office : PGS Jl. Bhayangkara Gg. Bhayangkara No.
16A Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Kota
Depok Jawa Barat.

Telp : 021-87717007

Fax : 021-87717007

Email : leaderinfo1@gmail.com atau

Cetakan Pertama : Desember 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Andi Yusran

Desentralisasi: formulasi kebijakan dan partisipasi: teori, konsep dan implementasi. penulis, Andi Yusran, Zulmasyhur, Bhakti Nur Avianto; editor, Wahyu Triono KS. –Depok: Lembaga Edukasi dan Advokasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LEADER), 2018.

224 hlm, 22 cm.

Bibliografi: hlm 202-204

ISBN 978-602-52023-2-2

1. Desentralisasi dalam pemerintahan. I. Judul.

II. Zulmasyhur.

III. Bhakti Nur Avianto.

IV. Wahyu Triono KS.

352.283

Kata Pengantar Penulis

Sudah menjadi impian para teoritis dan kemudian diamini oleh para praktisi, bahwa kebijakan desentralisasi adalah jalan cepat membangun sistem pemerintahan (di tingkat pusat dan lokal) yang mumpuni, professional, transparan, akuntabel dan produktif, melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat dapat berbagai tanggung jawab dengan daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal bertumbuh melalui pembukaan ruang partisipasi kepada publik dalam proses perumusan kebijakan.

Kebijakan desentralisasi tidak selamanya berbuah manis, beberapa studi kasus yang dilakukan oleh para sarjana di beberapa daerah di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan desentralisasi terkadang justru menjadi kontraproduktif dengan upaya membangun pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel, bahkan terdapat kecenderungan kalau kebijakan desentralisasi justru memperkuat otoriterisme lokal, mempererat kronisme dan menyuburkan praktik-praktik percaloan dan mafia proyek yang melibatkan pemegang otoritas di tingkat lokal dengan pengusaha yang dulunya terlibat sebagai 'pemodal' dalam Pilkada.

Mengapa harapan (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*) tidak sejalan dan sebangun? Buku ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan eksplorasi kasus perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) sebagai pintu masuk untuk membangun kesimpulan dari pertanyaan apakah kebijakan desentralisasi, khususnya desentralisasi politik yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia tahun 2001 yang lalu *compatible* dengan proses demokratisasi yang secara parallel digulirkan di tingkat lokal?

Banyak pihak yang telah terlibat sedari penulisan, pengeditan, editing hingga pencetakan buku ini, oleh itu, penulis sangat berterima kasih. Kepada mereka yang berkontribusi dalam penerbitan buku ini penulis patut mengucapkan terima kasih khusus, juga kepada rekan-rekan di Red-Post Institute, dan kolega-kolega penulis di Universitas Riau, Universitas Islam Riau dan di Universitas Padjadjaran Bandung yang namanya tidak disebutkan satu persatu. Anda-anda semua adalah 'oase' keilmuan yang senantiasa mengalir dan mengisi relung pemikiran penulis. Terima kasih untuk anda semua. []

Jakarta, November 2018

PENULIS

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar Penulis	III
Daftar Isi	V
 Bagian Pertama:	
Ada Apa Dengan Desentralisasi?	1
 Bagian Kedua:	
Perspektif Teori	12
2.1. Pengantar	12
2.2. Demokrasi	13
2.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	18
3.4. Formulasi Kebijakan Publik	31
3.5. Konsep Partisipasi Politik	49
 Bagian Ketiga:	
Perkembangan Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Tahun 1945-2014	63
3.1. Pengantar	63
3.2. Desentralisasi Masa Penjajahan	64
3.3. Desentralisasi Masa Revolusi Kemerdekaan	70
3.4. Desentralisasi Masa Demokrasi Liberal	75
3.5. Desentralisasi Masa Demokrasi Terpimpin	79
3.6. Desentralisasi Masa Orde Baru	86
3.7. Desentraalisasi Pasca Orde Baru	91

Bagian Keempat:

Perumusan Kebijakan Publik	125
4.1. Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Kebijakan Publik	125
4.2. Analisis Perumusan Kebijakan Publik: Kasus RPJMD Riau 2014-2019	148

Bagian Kelima:

Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Studi Kasus RPJMD Riau 2014-2019	175
5.1. Analisis Terhadap Konstruksi Kebijakan tentang Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	175
5.2. Evaluasi dan Analisis Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan	185
5.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan	200
Daftar Pustaka	208
Bio Data Penulis	222

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah : Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- _____. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Alderfer, H. F. 1964. *Local Government in Developing Countries*. New York: Mc Graw Hill Book.
- Almond A. Gabriel. 1974. *Comparative Politics Today*. Boston: Little Brown.
- Almond A, Gabriel. & Verba, Sydney. 1983. *Budaya Politik*. Terjemahan. Jakarta: Radjawali.
- Anderson, B.O'G. 1982. *Imagined Communities*. New York: Verso.
- Anderson, James E. 2003. *Public Policy Making. An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin.
- Basri, Faisal. 2003. "Prospek Otonomi Daerah". Dalam Indra J. Piliang (penyunting) *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, hlm. 1-11. Jakarta: Pondok Edukasi.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistim Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bird, R. & Wallich, C. 1993. *Fiscal Decentralization and Intergovernmental Relations in Transition Economies: Toward a Systemic Framework of Analysis*. Washington D.C: Policy Research Department, The World Bank.
- Bird, R & Vaillancourt, F. (penyunting). 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara Negara Berkembang*. Terjemahan. Jakarta: Gamedia Pustaka Utama
- Brillantes, Jr, Alex B. 2003. "Pemerintahan Lokal dan Desentralisasi: Pengalaman Philipina". Dalam Azis, A. & Arnold, David D. (penyunting.). *Desentralisasi Pemerintahan: Pengalaman Negara-negara Asia*, hlm. 247-270. Bantul: Pondok Edukasi.
- Brady, Henry. 1999. *Political Participation. In Measures of Political Attitudes*. San Diego: Academic Press

- Brewster, R. Wallace. 1963. *Government in Modern Society With Emphasis on American Institution*. 2nd edition. Boston: Houghton Mifflin & Co.
- Budiarjo. Miriam. 1982 (penyunting). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- Burns, D. & Hambleton, P. H. 1994. *The Politics of Decentralization: Revitalising Local Democracy*. London: Macmillan.
- Carino, J. K. 2003. "Pemerintahan Sendiri Lokal: Kasus Kotapraja Itogan di Philipina". Dalam Azis, A. & Arnold, David D. (penyunting.) *Desentralisasi Pemerintahan: Pengalaman Negara-negara Asia*, hlm. 271-301. Bantul: Pondok Edukasi.
- Cheema, G. S. & Rondinelli, D. A. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. London: Sage Publication.
- Chesney, Robert W. 2008. *The Political Economy of Media: Enduring Issues, emerging dilemmas*. New York: Monthly Review Press.
- Closky. Herbert. Mc. 1972. *Political Participation*. dalam *Internatinal Enclyclopedia of the Social Sciences*. New York : The MC and The Free Press.
- Conlan, Timothy. 1984. *From New Federalism to Devolution: Twenty Five Years of Intergovernmental Reform*. Washington, D.C: RR. Donnelly & Sons.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Jakarta : KIK Press.
- Crouch, Harold. 1979. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell Press.
- Dahl, Robert A. 1971. *Poliarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Deutsch. W Karl. 1974. *Politics and Government*. Boston: Houghton Mill in Comp.
- Dillinger, William. 1994. *Decentralization and Its Implication for Urban Service Delivery*. Washington D.C.: Urban Management Programme.
- Duchacek, I.D. 1970. *Comparative Federalism: The Territorial Dimension of Politics*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (terjemahan). Yogyakarta: UGM Press.
- Dwiyanto, Agus. (penyunting). 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yokyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

- Dye, Thomas R. 1976. *What Government do, Why They Do It, What Difference It Makes*. Alabama: University of Alabama Press.
- _____. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall.
- Easton, David. 1965. *A Framework for Political Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Effendi, Muhajir. 2000. "Hubungan Federatif yang Integratif". Dalam Andi Mallarangeng (penyunting) *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*, hlm. xi-xvi. Jakarta: Bigraf.
- Elazar, Daniel J. 1984. *American Federalism: a View From the State*. 3rd Edition. New York: Harper & Row Publishers.
- Elcock, Howard. 1982. *Local Government: Politicians, Professionals, and Public in Local Authorities*. New York: Metheun.
- Feith, Herbert. 1963. "The Dinamic of Guided Democracy". Dalam Ruth Mc Vey (penyunting) *Indonesia*, hlm 110-122. New Haven: Yale University Press.
- Gaventa, John (1980) *Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachina Valley*. Illinois: University of Illinois Press.
- _____. (2005) "Enam Proposisi Menuju Tata Pemerintahan Dacrah Partisipatoris", Dalam Sugeng Bahagijo (penyunting) *Orde Partisipasi: Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran*, Jakarta: Perkumpulan praKarsa.
- Gie, The Liang. 1993. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Grindle, Merile S. (penyunting). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third Word*. New Jersey: Princeton Universitas Press.
- Guruh, Suhda. 2000. *Menimbang Otonomi Versus Federal*. Bandung: Rosda.
- Halim, Abd. 2014. *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B.
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakanaksanaan Publik*. Jakarta: Peradaban.
- H.A.W. Widjaya. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Hampel, C. G. 1965. *Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in Philosophy of Science*. New York: Free Press.
- Hidayat, Syarif. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Kuantum.
- _____. 2006. *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal*. Jakarta: LIPI.

- _____. 2007. "Shadowstate?..Bisnis dan Politik di Provinsi Banten", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (penyunting), *Politik Lokal di Indonesia*, terjemahan. Bernhard Hidayat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2007b. *Too Much, Too Soon: Local State Elite's Perspective on and the Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hill, D.M. 1974. *Democratic Theory and Local Government*. London: Allen & Unwin.
- Hill, Hal. 1997. *Regional Development in Indonesia: Past Development, issues, and policy options*. Jakarta: International workshop on Regional Development Policy.
- Hoover, Kenneth R. 1980. *The Elements of Social Scientific Thinking*. New York: St. Marthin Press.
- Habermas, Jurgen 1989. *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press
- Humes, Samuel & Martin, Eileen. 1969. *The Structure of Local Government*. Hague: International Union of Local Authorities.
- Huntington, Samuel. P. 1984. *Political Order in Changing Societies*. New York: Little Brown & Co.
- Huntington, Samuel.P. dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang (terjemahan Sahat Simamora)*. Jakarta: Renika Cipta
- Iglesias, Gabriel U. 1987. *Regionalization and Regional Development in The Philippines*. Manila: UP CPA.
- Ikhsan, Mohamad. 2003. "Economic Issues in Indonesia". Dalam Yasutami Shimamora (penyunting) *The Role of Governance in Asia*, hlm 26-35. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jackson, K. D. & Pie, L. (penyunting) 1978. *Political Communication and Power in Indonesia*. California University Press.
- Johan, Johermansyah. 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Jones, G.W. (red) 1980. *New Approach to the Study of Central-Local Government Relationships*. Aldershot, Hans: Gower and SSRC.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kahin, George Mc Turnan. 1980. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kaloh, J. 2003. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Klinken, Gerry van. 2014. "Demokrasi Patronase Indonesia di Tingkat Provinsi". Dalam AE. Priyono dan Usman Hamid (penyunting), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. hlm. 225-256. Jakarta: Gramedia.
- Korten, David C dan George Carner, 1984. "Planning Frameworks for People Centered Development", dalam David C. Korten dan George Carner (penyunting). *People Centered Development: Contribution toward Theory and Planning Frameworks*, hlm. 201-210. Connecticut: Kumarian Press.
- Kristiadi, J. 1999. "Devolusi", Dalam Fadilah Putra (penyunting) *Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat*, hlm. v-xxi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laswell, Harold dan Abraham Kaplan, 1970. *Power and Society*. New Heaven, Yale University Press.
- Laswell, Harold. 1971. "The Structure and Function of Communication in Society". Dalam Schramm, W. ve Roberts, D. F. (penyunting). *The Process and Effects of Mass Communication*. hlm 84-99. Urbana: University of Illinois Press.
- Legowo, Tommy. 2003. "Indonesia in Transition". Dalam Yasutami Shimamura (penyunting) *The Role of Governance in Asia*, hlm 70-80. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Lev, Daniel S. 1963. *Transition Toward Guided Democracy*. New York: Cornell University Press.
- Lipset. Seymour Martin. 1960. *Political Man : The Social Bases of Politics*. Bombay: Vakils, Feffer.
- Litvack, Jeinie & Seddon, J. (penyunting) 1999. *Decentralization: Briefing Note for Notes*. Washington D.C: World Bank Institute.
- Loughlin, M. 1986. *Local Government in the Modern State*. London: Sweet & Maxwell.
- Lubis, Solli. 1985. *Perkembangan Garis Perundangan Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

- Malaranggeng, Andi. (red). 2000. *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Malang: Bigraf.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusham FH-Universitas Islam Indonesia.
- Mariana, Dede, & Carolina Paskarina, 2008. *Demokrasi Politik & Politik Desentralisasi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mas'Oed, Mohtar. 1989. *Struktur Politik dan Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Mas'Oed, Mohtar. 1994. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mathew, G. 2003. "Panchayat: Sistem Pemerintah Sendiri Lokal di India". Dalam. Azis, A. & Arnold, David. (penyunting). *Desentralisasi Pemerintahan Negara-negara Asia*, hlm 155-203. Bantul: Pondok Edukasi.
- Mawhood, Philip. 1985, "Decentralization: The Concept and the Practice", Dalam Philip Mawhood, (penyunting). *Local Government in the Third World*, hlm 1-24. Chichester: John Wiley & Sons
- Midwinter, A. 1984. *The Politics of Local Spending*. Edinburgh: Main-Stream.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mosca, Gaetano, 1939. *The Ruling Class*, New York: Mc Graw Hill
- Muhaimin, Yahya. 1990. *Kebijakan Otonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Muslimin, Amrah. 1978. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Study Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Nasution, Arif. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Nie. Norman H dan Sidney Verba. 1986. "Political Participation", dalam Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown (penyunting). *Comparative Politics, Notes and Reading*, Chicago.
- Nordholt, H.S, & Gerry van Klinken (penyunting). 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV.
- Nugroho, Riant. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Nusa Bakti, Ikrar. 2002. *Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Mizan.

- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan. Jakarta: Prenada Media.
- Paskarina, Caroline. 2005. *Perencanaan Partisipasi dalam Pembangunan Daerah*, Jakarta
- Peter, B. Guy. 2001. *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge.
- Piliang, Indra, J. (penyunting). 2003. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Pondok Edukasi.
- Pressman, Jeffrey & Wildavsky, Aaron. 1973. *Implementation*. Berkeley, California: University of California Press.
- Putra, Fadillah. 1999. *Devolusi: Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Negara-Rakyat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Pye, Lucian W. 1966. *Aspect of Development*. New York: Little Brown & Co.
- Rasyid, Moh. Ryaas. Affan Gaffar dan H.R. Syaukani. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Moh. Ryaas. 2003. "Regional Autonomy and Local Politics in Indonesia". Dalam. Edward Aspinal & Greg Fealy (penyunting) *Local Power and Politics in Indonesia*, hlm. 63-71. Singapore: Institute Of South East Asian Studies.
- Rhodes, R. 1986. *The National World of Local Government*. London: Allen & Unwin.
- Ripley, Randal B. 1984. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Brooks.
- Rosenbloom, D.H. 1993. *Publik Administration: Understanding Management, Politic and Law in the Public Sector*. 3rd edition. New York: Mc Graw-Hill.
- Roskin, Michael G. 2000. *Political Science: An Introduction*, New Jersey: Prentice hall
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sarundajang, S.H. 2001a. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 2001b. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Schurmpeter, Joseph A. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy*, London: George Allen & Unwin Publisher Ltd..
- Shiroyama, Hideaki. 2001. *Practice and Issues of Governance Reform: the Case of Decentralization in Indonesia*. Tokyo: JIIA.
- _____. 2003. "Regional Governance in Asia: Comparative Analysis of Experiments of Decentralization and

- Deconcentration in Indonesia, Thailand and Korea". Dalam Yasutami Shimamora (penyunting) *The Role of Governance in Asia*, hlm 6-25. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Sirajuddin. 2006. *Legislatif Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Malang: Yapikka
- Smith, B.C. 1967. *Field Administration: an Aspect of Decentralization*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimensional of the State*. Sydney: George Allen & Unwin.
- Stewart, J. 1986a. *The New Management of Local Government*. London: Allen & Unwin.
- Stewart. J. and Stoker, G. (pnyt.). 1989. *The Future of Local Government*. London: Macmillan.
- Stoker, Gerry. 1988. *The Politics of Local Government*. Second ed. London: Macmillan Press.
- Strauss, Leo. dan Joseph Cropsey, 1987. *History of Political Philosophy*, (Chicago and London : The University of Chicago Press
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia.
- Sulistyo, Hermawan. 1998. *Kebangsaan, Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PPL LIPI.
- Sulton, Mawardi. 2003. *Otonomi Daerah dan Kinerja Pelayanan Publik, Study Kasus Lombok Barat dan Bandar Lampung*. Makassar: Smeru
- Supriady, Dedy & Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Truman, David B. 1960. *The Governmental Process: Political Interest and Public Opinion*. New York: Albert Knopft.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- _____. 2005. "Desentralisasi dan otonomi Daerah Masa Reformasi (1999-2004)", Dalam Anhar Gonggong (penyunting). *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 tahun*, hlm, 155-193. Jakarta: Yayasan ILD Tifa.
- Wibawa, Samodra, Yuyun P dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS.
- Winters, Jeffrey A. 2014. "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia". Dalam AE Priyono dan Usman Hamid (penyunting), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*, hlm. 201-224. Jakarta: Gramedia.
- Yusran, Andi. 2000. *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Pembangunan Kontemporer*. Pekanbaru: Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP).
- _____. 2003. "Money Politics Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Riau: sebuah penelitian awal". Dalam. Nino L. Kana. (penyunting). *Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, hlm. 70-80. Solo: Percik.
- _____. 2007. *Desa Dalam Bingkai Pembangunan; Studi Provinsi Riau*, Pekanbaru: UIN Susa Press.
- Yusri, Ali. (penyunting). 1998. *Analisis Pelaksanaan Otonomi Percontohan di Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UNRI.

JURNAL

- Santoso, Amir, 1998, "Analisis Kebijakan Publik, Suatu Pengantar". Jurnal Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia
- Arnstein, Sherry. R. 1969. "A Lader of Citizen Participation", *JAIP Jurnal*, 35(4): 216-224.
- Conyers, D. 1981. "Decentralization of Regional Development: a Comparative study of Tanzania, Zambia and Papua New Guinea". *Public Administration and Development* 10(2): 112-120.
- Crouch, Harold. 1979. "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia". *Word Politics* 5(7): 110-120.
- Deliarnov. 2003. "Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Riau". *Demokrasi dan Otonomi Daerah* 1(1): 107-111.
- Fung, A. dan E.O.Wright. 2001. "Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance", *Politics and Society*. 29 (I):5-41.
- Fung, A. 2002. "Creating Deliberative Publics: Governance after Devolution and Democratic Centralism". *The Good Society*. 11 (I): 66-71.
- Hardiman, Budi. 2004. "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Suharto?" *Basis*, No. 11(12): 18

- Hart, D.K. 1972. "Theories of Government Related to Decentralization and Citizen Participation". *Public Administration Review* 32(4): 310-320.
- Heller, P. 2001. "Moving The State: The Politics Of Democratic Decentralization in Kerala, South Africa and Porto Alegre". *Politics and Society*, 29(1): 131-163.
- John, M.S. dan Chathukulam J. 2003. "Measuring Decentralisation: the Case of Kerala (India)". *Publik Administration and Development* 23(5): 347-360.
- Lowndes, V. and Stoker. G. 1992a. "An Evaluation of Neighbourhood Decentralisation: Customer and Client Perspectives". *Policy and Politics* 20(1) 210-215.
- Ouedraogo, H. M. S. 2003, "Decentralisation and local government: experiences from Francophone West Africa", *Public Administration & Development* 23(2) 97-103.
- Rhodes, R. 1985. "Inter-Governmental Relation in the Post-War Period". *Local Government Studies* 11(6): 35-57.
- Rahmatunnisa, Mudiayati. 2011. "Demokrasi dan Desentralisasi", *Jurnal Governance*, 1(2): 1-21.
- Sudirman, Dede Wiliam dan Sian McGrath. 2005. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Dalam Ketidakpastian, Tantangan, dan Harapan". *Decentralization Brief* 7(4): 20-35.
- Suroso, Hadi, Abdul Hakim dan Irwan Noor, 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik". *Jurnal Wacana* 17(1): 7-15.
- Terminasian, Teresa. 1997. "Decentralizing Government". *Finance and Government*. 10(3): 236-239.
- The World Bank. 2001. *Indonesia: Country Assistance Strategy*. 2001-2003.
- Wunsch, J. S. 2001. "Decentralization, Local Governance, and Recentralization in Afrika". *Public Administration and Development* 21(4): 277-288.

DISERTASI//TESIS/PAPER/ MAKALAH/LAPORAN RISET

- Alagan, L.S. dkk. 2008. Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Sebagai Pelaksanaan Hak Politik, laporan penelitian, tidak dipublikasikan.

Sudah menjadi impian para teoritis dan kemudian diamini oleh para praktisi, bahwa kebijakan desentralisasi adalah jalan cepat membangun sistem pemerintahan (di tingkat pusat dan lokal) yang mumpuni, professional, transparan, akuntabel dan produktif, melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat dapat berbagai tanggung jawab dengan daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal bertumbuh melalui pembukaan ruang partisipasi kepada publik dalam proses perumusan kebijakan.

Kebijakan desentralisasi tidak selamanya berbuah manis, beberapa studi kasus yang dilakukan oleh para sarjana di beberapa daerah di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan desentralisasi terkadang justru menjadi kontraproduktif dengan upaya membangun pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel, bahkan terdapat kecenderungan kalau kebijakan desentralisasi justru memperkuat otoriterisme lokal, mempererat kronisme dan menyuburkan praktik-praktik percaloan dan mafia proyek yang melibatkan pemegang otoritas di tingkat lokal dengan pengusaha yang dulunya terlibat sebagai 'pemodal' dalam Pilkada.

Mengapa harapan (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*) tidak sejalan dan sebangun? Buku ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan eksplorasi kasus perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) sebagai pintu masuk untuk membangun kesimpulan dari pertanyan apakah kebijakan desentralisasi, khususnya desentralisasi politik yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia tahun 2001 yang lalu *compatible* dengan proses demokratisasi yang secara paralel digulirkan di tingkat lokal? Buku ini memberi jawaban dan mengulas tentang hal tersebut.

Penerbit:



ISBN 978-602-52023-2-2



DESENTRALISASI

FORMULASI KEBIJAKAN DAN PARTISIPASI



TEORI, KONSEP DAN IMPLEMENTASI



Andi Yusran
Zulmasyhur
Bhakti Nur Avianto

